

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi saat ini, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pun semakin luas. Kebutuhan akan pelayanan berbasis teknologi informasi dirasa sangat diperlukan di berbagai bidang, tidak terkecuali didalam sistem pemerintahan. Dengan perkembangan teknologi informasi, permasalahan seperti pendataan manual yang kerap ditemui dalam instansi pemerintahan dapat diselesaikan dengan solusisolusi yang lebih inovatif. Pemanfaatan teknologi guna mengatasi masalah yang kerap ditemukan belum diterapkan merata ke seluruh organisasi di Indonesia, khususnya instansi pemerintahan. Instansi pemerintah yang merupakan wadah bagi masyarakat dalam segala permasalahan kewarganegaraan diharapkan memiliki sumber daya yang memadai guna memfasilitasi warganya. Dalam penerapannya, di perlukan suatu teknologi baru yang dapat digunakan untuk memenuhi informasi yang efektif bagi masyarakat tanpa mengindahkan kenyamanan pelayanan hanya dengan sistem yang sederhana.

Pengelolaan Keuangan Daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan amanat untuk mengatur Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sebuah Peraturan Pemerintah. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Keuangan Daerah selain diatur dengan Peraturan Pemerintah juga mengikuti Peraturan Menteri dan keuangan daerah juga mengikuti Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang

ditetapkan setiap tahun, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing daerah yang disinkronkan dan dikelola secara sistematis. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan belanja APBN pada Kementerian Negara/Lembaga dan/atau Satker

Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS, adalah dokumen permintaan pembayaran yang dibuat/diterbitkan oleh PPK yang dibayarkan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/ Penerima Hak atas dasar kontrak kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat SPM-LS, adalah SPM langsung kepada Bendahara Pengeluaran/Penerima Hak yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk atas dasar kontrak kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di kantor Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah diperoleh temuan bahwa penerbitan SPM-LS di kecamatan Pangkalan Baru belum menggunakan teknologi basis data sehingga kurang efektif dalam pencarian data apabila data tersebut dibutuhkan secara mendesak. Selain itu pendataan dokumen yang berhubungan dengan penerbitan SPM-LS belum terorganisir dengan baik, sehingga dokumen yang diperlukan untuk proses selanjutnya membutuhkan waktu lama untuk mencarinya. Penerbitan SPM-LS masih dilakukan secara manual dalam program pengolah kata (*Ms. Word*). Hal tersebut memungkinkan pembuatan SPM-LS menjadi lambat. Semua dokumen penting yang mendukung penerbitan SPM-LS hanya tersip dalam lembaran kertas dan pendataan belum terintegrasi hanya menggunakan aplikasi pengolah kata (*Ms. word*) sehingga kurang efektif dan efisien. Hal ini dinilai kurang efektif karena semua dokumen penting penerbitan SPM-LS bisa saja hilang, rusak ataupun terbakar karena suatu hal yang tidak diinginkan. Selain itu pendataan secara manual juga dinilai kurang efisien dan pengolahan data cenderung masih lambat. Kecamatan Pangkalan Baru berkeinginan memiliki sistem informasi prosedur penerbitan SPM-LS yang

diakses secara internal yang memudahkan bidang bendahara keuangan dalam melakukan penerbitan SPM-LS. Belum adanya sistem informasi prosedur penerbitan SPM-LS mengakibatkan pemborosan waktu dan biaya akibat dari sistem yang tidak memiliki fitur-fitur dan fungsionalitas yang bermanfaat dan sesuai. Suatu sistem informasi yang dibuat harus efektif dan sesuai dengan kebutuhan. Oleh sebab itu Sistem Informasi prosedur penerbitan SPM-LS ini juga akan diuji kelayakan agar sistem terjamin kualitasnya.

Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan, pada penelitian ini penulis membangun sistem perancangan yang akan diimplementasikan dalam penelitian berikut **“Pengembangan Sistem Informasi Prosedur Penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Studi Kasus Kantor Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah dengan Metode FAST”** karena penggunaan dan cara aksesnya yang begitu mudah sehingga sangat efektif untuk membantu mengelola penerbitan SPM-LS untuk menunjang kelancaran bidang Bendahara Keuangan pada kantor Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah.

1.2 RumusanMasalah

Dari uraian latar belakang masalah maka dapat diuraikan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana menganalisis Pengembangan Sistem Informasi Prosedur Penerbitan SPM-LS pada Kantor Kecamatan Pangkalan Baru?
2. Bagaimana penerapan Pengembangan Sistem Informasi Prosedur Penerbitan SPM-LS pada Kantor Kecamatan Pangkalan Baru menghasilkan informasi yang efektif?
3. Bagaimana memenuhi kebutuhaninformasi untuk mengoptimalkan kerja bendahara keuangan dalam Prosedur Penerbitan SPM-LS pada Kantor Kecamatan Pangkalan Baru ?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis membatasi ruang lingkup masalah Pengembangan Sistem Informasi Prosedur Penerbitan SPM-LS pada Kantor Kecamatan Pangkalan Baru, antara lain:

1. Pendataan Berkas SPJ
2. Pembuatan SPP
3. Pembuatan SPM
4. Pendataan SP2D
5. Pendataan Validasi Bank
6. Pendataan Bukti Transfer

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, dapat dituliskan tujuan penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Mengembangkan Sistem Informasi Prosedur Penerbitan SPM-LS pada Kantor Kecamatan Pangkalan Baru yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan prosedur penerbitan SPM-LS.
2. Menjamin kualitas Sistem Informasi Prosedur Penerbitan SPM-LS pada Kantor Kecamatan Pangkalan Baru agar sesuai dengan standar yang berlaku.

Adapun manfaat dari pengembangan Sistem Informasi Prosedur Penerbitan SPM-LS pada Kantor Kecamatan Pangkalan Baru adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Sistem Informasi Prosedur Penerbitan SPM-LS pada Kantor Kecamatan Pangkalan Baru ini diharapkan dapat meningkatkan prosedur penerbitan SPM-LS agar dapat dikontrol dengan baik.
2. Pengembangan Sistem Informasi Prosedur Penerbitan SPM-LS pada Kantor Kecamatan Pangkalan Baru ini dapat menjadi referensi untuk penelitian berikutnya yang dapat dikembangkan kembali nantinya.
3. Mempermudah pengelolaan dokumen Prosedur Penerbitan SPM-LS pada Kantor Kecamatan Pangkalan Baru.
4. Mempermudah dalam pembuatan Prosedur Penerbitan SPM-LS pada Kantor Kecamatan Pangkalan Baru.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan laporan ini, pembahasan dan penganalisaannya diklasifikasikan secara sistematis ke dalam 5 (lima) bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam tahap ini atau bab ini penulis menjelaskan mengenai latarbelakang, Rumusan masalah, Batasan Masalah, Tujuan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini penulis menerangkan teori-teori yang digunakan sebagai panduan yang mendasari Pengembangan Sistem Informasi Prosedur Penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Studi Kasus Kantor Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah dengan Metode FAST dimana terdapat kutipan dari buku-buku, sumber internet yang meliputi dari jurnal penelitian terpublikasi maupun makalah dan sumber referensi lainnya yang mendukung penyusunan skripsi.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini membahas mengenai model apa yang digunakan dan tahapan-tahapan apa saja yang digunakan dalam proses penelitian sistem.

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

Bab ini menjelaskan perencanaan dalam pengembangan suatu sistem penerbitan surat perintah membayar langsung di instansi untuk mengoptimalkan kerja bendahara keuangan di instansi tersebut. Dalam bab ini ada beberapa uraian yaitu: Proses Bisnis, Activity Diagram, Analisa Masukan, Analisa Keluaran, Identifikasi kebutuhan, Use Case Diagram, Deskripsi Use Case, ERD (Entity Relationship Diagram),

Transformasi ERD ke LRS, LRS (logical Record Structure), Tabel, Spesifikasi Basis Data, Class Diagram, Sequence Diagram, Deployment Diagram, Rancangan Layar dan Tampilan Layar.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis menjelaskan kesimpulan dari apa yang telah penulis lakukan dalam menulis Laporan Skripsi ini, serta memberikan saran-saran terhadap analisa dan perancangan yang dibuat agar tetap bermanfaat dan bisa digunakan seutuhnya dalam proses kerjapengolahan Pengembangan Sistem Informasi Prosedur Penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) di Kantor Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah.

